

Dampak Kebijakan Executive Order 13769 di Era Pemerintahan Donald Trump terhadap Imigran Muslim di Amerika Serikat Tahun 2017-2021

Putri Bilqis Oktaviani¹ & Ahmad Khoirul Umam²

¹ Paramadina Graduate School of Diplomacy, Paramadina University

² Paramadina Graduate School of Diplomacy, Paramadina University

Abstract. Penelitian ini membahas tentang dampak dari kebijakan Executive Order 13769 di era Pemerintahan Donald Trump terhadap Imigran Muslim di Amerika Serikat tahun 2017-2021. Artikel ini menganalisis secara details terkait latar belakang kebijakan, perdebatan terhadap kebijakan yang di seluruh negara bagian Amerika Serikat, dampak kebijakan terhadap relasi antara Amerika Serikat dengan 7 negara yang dilarang kedatangannya oleh Presiden Donald Trump. Penelitian ini juga akan dianalisa lebih jauh menggunakan teori konstruktivisme yang menekankan kepada isu identitas dan konsep kepentingan. Penelitian ini menggunakan aplikasi MAXQDA guna mengklasifikasikan teori dan membuktikan korelasi teori dengan isu yang dibahas. Penelitian ini menemukan bahwa kebijakan yang dibuat oleh Donald Trump memberikan dampak signifikan terhadap aspek keamanan masyarakat, sosial-ekonomi dan juga kohesivitas masyarakat Amerika yang selama ini dikenal multikultural. Hal itu menjadikan dasar mengapa kebijakan ini tidak berjalan efektif dan hanya dijadikan Donald Trump untuk menjustifikasi supremasi kepentingannya.

Keywords.: Identity, Constructivism, Migration, Muslim, *Executive Order*, Donald Trump

1. Pendahuluan

Migrasi internasional merupakan fenomena kontemporer dalam hubungan internasional yang mengalami peningkatan terutama perpindahan yang dilakukan dari negara berkembang menuju negara maju atau laju migrasi yang dilakukan kesesama negara berkembang (Weiner, 1985). Penelitian Zoberg and Massey menjelaskan migrasi internasional merupakan proses politik karena migrasi internasional melibatkan perpindahan individu dari yurisdiksi negara satu ke negara lainnya bahkan prosesnya menghasilkan perubahan kewarganegaraan (Hirschman et al., 1999).

Migrasi internasional merupakan salah satu hak yang dimiliki oleh setiap individu. Namun, Erdem Selvin menjelaskan bahwa walau melakukan migrasi ke negara lain merupakan salah satu hak individu tersebut, tidak berarti hal tersebut berlaku terhadap hak untuk masuk kewilayah suatu negara (Selvin,

2016). Negara penerima memiliki kebijakan masing-masing terhadap migrasi internasional.

Imigran Muslim bukan menjadi fenomena baru di Amerika Serikat mengingat kedatangan migrasi Muslim hadir jauh sebelum penyerangan gedung WTC. Permasalahan utama yang bertahan hingga saat ini adalah bagaimana para aktor yang berkonflik untuk memenuhi kepentingan mengkombinasikan kepentingan tersebut dengan isu identitas.

Banyaknya masyarakat Muslim melakukan migrasi ke Amerika Serikat karena Amerika Serikat memberikan citra tersendiri bagi masyarakat Amerika mengingat sensitivitas perbedaan antar identitas barat dan Muslim melonjak pasca penyerangan gedung WTC.

Eskalasi konflik terhadap identitas Islam dan imigran Muslim di Amerika Serikat mengalami peningkatan pasca terpilihnya Donald Trump menjadi Presiden Amerika Serikat pada 2017 – 2021. Donald Trump menandatangani kebijakan Executive Order 13769 pada tahun 2017 (House, 2017).

Kebijakan Executive Order 13769 merupakan kebijakan yang menanggukkan warga asing untuk datang ke Amerika Serikat dari tujuh negara Muslim yang dianggap bahwa negara tersebut memiliki potensi akan hadirnya kelompok terorisme. Tujuan dasar dibuatnya kebijakan tersebut adalah untuk melindungi penduduk Amerika Serikat dan menghindari penyebaran jaringan terorisme dari 7 negara Muslim yang diyakini dan dinilai memiliki latar belakang berkembangnya nilai dan praktik terorisme yaitu Iraq, Iran, Libya, Somalia, Sudan, Siria dan Yaman.

2. Literature review

Penelitian ini akan menggunakan teori konstruktivisme dalam menganalisa kebijakan Executive Order 13769 terhadap imigran Muslim di Amerika Serikat mengingat dinamika penyebaran imigran muslim di Amerika Serikat memiliki tantangan tersendiri, dilihat bagaimana respon pemerintah Amerika Serikat yang sudah memiliki stigma negatif terhadap imigran Muslim. Namun, hal tersebut menjadi dasar bagi imigran Muslim untuk bertahan di tengah keterasingan dan menjaga eksistensi Muslimnya. Sebelum membahas lebih lanjut, penulis akan membahas bagaimana gagasan dasar konstruktivisme menjadi teori untuk menganalisa dinamika imigran Muslim untuk menjaga eksistensi identitasnya, keberadaannya di negara kawasan Amerika Serikat yang mana negaranya diberlakukan kebijakan ketat terhadap warga Muslim setelah ditandatangani Executive Order 13679 oleh Presiden Donald Trump.

Konstruktivisme merupakan teori yang membantu untuk memahami suatu fenomena dibandingkan hanya melihat fenomena tersebut sebagai sebuah produk sejarah (Jackson & Sorensen, 1999). Memahami konstruktivisme berawal dari bagaimana fenomena sosial diteliti dari pemahaman status quo. Seperti halnya imigran Muslim yang menjaga eksistensinya di kawasan Amerika Serikat, diperlukan metode yang strategis agar imigran Muslim tersebut dapat diterima oleh mayoritas, memiliki ruang dan dapat menjaga tradisi ke Islamannya tanpa takut akan ancaman dari penduduk lokal, mengingat dari kebijakan kedatangan imigran asing dari negara Muslim, ketatnya kebijakan terhadap diaspora Muslim di Amerika Serikat dan berbagai dampak lain.

Konstruktivisme melihat dunia sebagai konstruksi sosial (Theys, 2018). Peristiwa yang terjadi di dunia

internasional tidak serta merta terjadi begitu saja, namun terdapat aktor yang membentuk peristiwa tersebut sehingga dunia internasional memiliki sifat yang tidak stagnan, sulit diprediksi dan dinamis karena bergantung kepada pemahaman, kepercayaan aktor yang membentuk peristiwa tersebut. Alexander Wendt (1992) mengilustrasikan bagaimana 500 senjata nuklir Inggris Raya tidak akan memberikan ancaman lebih dibandingkan senjata nuklir Korea. Ilustrasi tersebut memberikan sebuah makna bukan karena material senjata nuklir melainkan makna atau stigma yang telah dibentuk atau dikenal dengan struktur ideal (Hurd, 2008). Pemahaman konstruktivisme menekankan kepada konstruksi sosial dan relasi terhadap negara dan kepentingan negara

Wendt menjelaskan ada beberapa gagasan dasar dari teori konstruktivisme. Pertama, konstruktivisme berargumentasi bahwa agensi dan struktur dibentuk Bersama. Agensi yang dimaksud adalah aktor, sehingga agensi dapat mempengaruhi struktur dan struktur mempengaruhi aktor. Agensi tersebut menggambarkan bagaimana seorang aktor memiliki kapasitas dan kapabilitas, kemampuan untuk membentuk struktur internasional. Dalam konteks penelitian ini, agensi merujuk kepada Amerika Serikat yang menjadi aktor pembuatan kebijakan executive order 13769. Kebijakan yang dibentuk oleh Amerika Serikat ini memberikan pengaruh terhadap hubungannya dengan struktur imigran Muslim yang ada di Amerika Serikat. Amerika Serikat mampu membentuk sistem keamanan baru terhadap adanya ancaman yang datang dari sebuah citra yang dibentuk oleh Amerika Serikat. Kebijakan Executive Order 13769 telah membentuk sudut pandang yang membuat masyarakat mempercayai bahwa terdapat entitas yang berbahaya yang mengarah kepada identitas Muslim terutama pasca penyerangan gedung WTC pada tahun 2001. Kebijakan executive order 13769 tersebut tidak hanya memberikan pengaruh kepada imigran yang berasal dari tujuh negara, namun ditujukan juga kepada penduduk sah, pemilik kewarganegaraan ganda selain Amerika Serikat dan Kanada, para pendatang yang akan menuju Amerika ditanggukkan di bandara serta pendatang yang sudah memiliki visa juga tidak mendapatkan izin untuk melanjutkan penerbangannya ke Amerika Serikat begitu juga dengan pendatang yang telah tiba di negara transit (Pujayanti, 2017).

Gagasan kedua adalah konstruktivisme menjunjung nilai identitas. Konstruktivisme berargumen bahwa negara dapat memiliki beberapa

identitas yang dibentuk menyesuaikan aktor yang menjadi lawan interaksinya. Identitas menjadi kunci utama dalam mewakili jati diri dan kepentingan aktor tersebut. Kebijakan Executive Orders 13769 memberikan gambaran bagaimana Amerika Serikat memiliki multi identitas walau memang pada hakikatnya Amerika Serikat tidak memiliki identitas asli. Amerika Serikat mengklaim bahwa negara tersebut merupakan negara demokrasi, namun kebijakan tersebut tidak memberikan cerminan terhadap nilai-nilai demokrasi pada implementasinya.

Hal tersebut dapat dilihat dari bagaimana demokrasi menjunjung tinggi nilai kesetaraan, memberikan keamanan terhadap semua warga tanpa melihat ras, suku, agama. Namun dari kebijakan yang telah dibentuk tersebut, Amerika Serikat sendiri yang membentuk sebuah stigma khusus terhadap entitas Muslim bahwa adanya ancaman yang akan diberikan oleh masyarakat Muslim kepada warga atau teritorial Amerika Serikat. Amerika Serikat mempercayai bahwa adanya nilai *vis a vis* yang dimiliki oleh Amerika Serikat dan Masyarakat Muslim sehingga ketika perbedaan tersebut tidak bisa diterima, maka Amerika Serikat membentuk sebuah prasangka dan stigma terhadap identitas Muslim karena nilai tersebut tidak dapat dilakukan asimilasi terutama ketika nilai tersebut bersinggungan dengan kepentingan Amerika Serikat. Amerika Serikat mengidealkan keamanan bagi domestik maupun lingkungan internasional, namun Amerika juga memberikan pelabelan terhadap negara-negara yang dianggap memiliki intensitas ancaman yang tinggi karena dinilai wilayah tersebut merupakan wilayah dari sumber terorisme.

Nilai yang dianut oleh masyarakat Muslim yang belum diterima oleh Amerika Serikat menjadi dasar bagaimana para pelaku migran Muslim mempertahankan identitasnya di kawasan Amerika Serikat. Tidak dapat dipungkiri, menjaga identitas di Amerika Serikat mengalami berbagai hambatan karena masyarakat Amerika Serikat memiliki pemahaman bagaimana imigran Muslim memiliki keinginan untuk melakukan penyerangan terhadap kawasan Amerika Serikat karena telah terbentuknya stigma negatif terhadap pemahaman Islam. Para pelaku diaspora Muslim menjaga identitas Muslimnya di tengah ketatnya kebijakan executive order 13769 yang dibentuk oleh Amerika Serikat.

Kebijakan tersebut memberikan pengaruh yang signifikan karena adanya penangguhan terhadap status imigrasi para pelaku diaspora. Beberapa universitas menolak dilakukan pengecekan status keimigrasian mahasiswa/i nya dengan tujuan agar

mereka tidak terkena deportasi dari kebijakan tersebut (Pujayanti, 2017). Namun, tidak dapat dipungkiri bahwa aktor yang bermain tidak hanya para pelaku imigran Muslim di Amerika, Amerika Serikat sebagai negara adidaya pun memiliki identitas yang ingin dipertahankan. Dengan motto "Make America Great Again" dan "American First" menjadi dasar bagi pemerintahan Donald Trump dalam membuat kebijakan Executive Orders 13679. Kebijakan tersebut bersifat unilateralisme, yakni sifat dan tindakan yang diambil secara sepihak, biasanya dilakukan dengan tujuan untuk kepentingannya dengan berbagai pertimbangan dan dampak yang telah diperhitungkan. Amerika Serikat pada hakikatnya merupakan negara yang ramah dalam menerima imigran, namun memang tidak dapat dipungkiri pasca penyerangan Gedung WTC, Amerika Serikat lebih waspada dalam menjaga keamanan teritorial dan keamanan manusia (penduduk Amerika Serikat).

Ketiga, konstruktivisme menekankan kepada norma dan institusi (Steans & Llyord, 2009). Norma tersebut merujuk kepada tingkah laku yang diambil oleh aktor berdasarkan atas identitas yang dimiliki oleh aktor tersebut. Pada tingkatan analisa dalam jurnal ini adalah kelompok transnasional yang menjaga nilai dan normanya di tengah masyarakat Amerika Serikat yang memiliki rasa traumatis tersendiri terhadap peradaban Islam. Dari sudut pandang Amerika Serikat, kebijakan Executive Order 13679 tersebut menjadi dasar dalam menjustifikasikan kebijakan tersebut.

Ketiga gagasan tersebut, agen, norma, identitas berpengaruh terhadap satu sama lain dan juga memberikan pengaruh kepada struktur terhadap sistem internasional yang sudah terbentuk. Pemahaman tersebut memperjelas kebijakan Executive Order 13769 yang dibentuk oleh Amerika Serikat di bawah kepemimpinan Donald Trump memperlihatkan bahwa Amerika Serikat sebagai seorang agen memiliki kapasitas untuk membentuk stigma yang kuat dan berdasar bahwa adanya suatu ancaman dari sebuah entitas dan identitas yang berasal dari masyarakat Muslim. Sehingga Amerika Serikat mengonstruksikan kembali keamanan baik keamanan domestik maupun keamanan internasional terhadap masyarakat Muslim yang berasal dari ketujuh negara tersebut.

Namun memang pada kenyataannya banyak pelaku imigran yang mengalami dorongan kuat untuk pergi ke negara kawasan Amerika Serikat mengingat negara – negara di kawasan Timur Tengah mengalami peperangan dan negara asal mereka

menjadi negara yang lebih kompleks karena hadirnya tentara asing, kelompok terorisme, dan peran negara yang lemah sehingga mendorong para pelaku migran untuk pergi ke negara Amerika Serikat. Mereka yang datang ke Amerika Serikat, akan berusaha membangun kembali identitas asal mereka yaitu Islam (Al-Alwani, 2015). Sehingga kedatangan para pelaku diaspora Muslim mengalami restriksi oleh pemerintah Amerika Serikat.

3. Metode Penelitian

Metode penelitian ini akan menggunakan metode penelitian kualitatif, deskriptif dan analitis. Data sekunder akan menjadi sumber data utama yang di perlukan dalam penelitian ini guna menjaga keutuhan objek penelitian.

Data sekunder merupakan data yang didapatkan dari beberapa sumber baik berupa buku, jurnal, dokumen resmi, laporan tertulis serta dokumen-dokumen yang berkaitan dengan objek penelitian. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dalam menganalisa permasalahan dan akan menggunakan teknik pengumpulan data dalam bentuk library research.

Penggunaan metode penelitian kualitatif ini adalah untuk memahami suatu kondisi dari konteks yang mengarahkan kepada pendeskripsian secara terperinci dan mendalam terhadap potret kondisi dalam konteks yang alami mengenai apa yang sebenarnya terjadi menurut apa adanya di lapangan studi (Dr.farida Nugrahani, 2014). Peneliti Denzim dan Lincoln menyatakan bahwa kata kualitatif mengisyaratkan pada penekanan proses dan makna yang tidak dikaji secara ketat dan atau belum diukur dari sisi jumlah, intensitas, kuantitas dan frekuensinya (Denzin & Lincoln, 2018). Penelitian ini menggunakan aplikasi MAXQDA yang mana MAXQDA merupakan sebuah aplikasi yang digunakan untuk membantu menganalisa dengan cara melakukan coding berdasarkan pedekan yang digunakan.

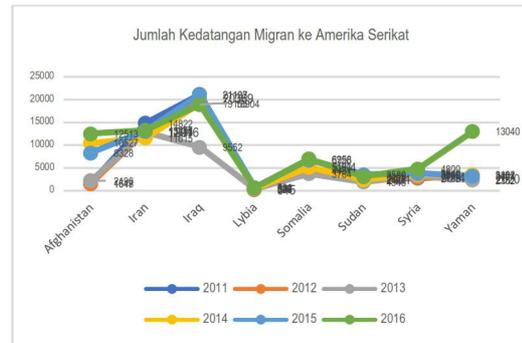
4. Analisis

Migrasi internasional mengalami peningkatan dalam beberapa dekade terakhir. Para pelaku imigran yang melakukan migrasi ke Amerika Serikat terdiri dari berbagai suku, ras, agama dan berbagai latar belakang yang berbeda hingga Amerika Serikat dikenal dengan sebagai negara cosmopolitan.

Masyarakat muslim merupakan salah satu populasi yang sedang berkembang di Amerika Serikat.

Berikut potret demografi penyebaran imigran muslim ke berbagai wilayah negara bagian di Amerika Serikat

Grafik 1. Jumlah kedatangan migran ke Amerika Serikat



Sumber: diolah oleh penulis dari "U.S Department of Homeland Security" (U.S Department of Homeland Security, 2020)

Grafik 1 menunjukkan ilustrasi kedatangan migran ke Amerika Serikat dalam kurun waktu 2011 – 2016. Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa Iraq menjadi salah satu negara pendatang terbanyak dari tahun 2011 hingga tahun 2016, kecuali di tahun 2013 dimana kedatangan terbanyak berasal dari Iran. Beberapa decade terakhir, Amerika Serikat menjadi negara tujuan yang populer untuk para migran di seluruh dunia. Tingginya kedatangan migran ke Amerika Serikat sebagai negara super power memiliki berbagai alasan seperti ingin mendapatkan kesempatan untuk mengembangkan perekonomian, menghindari dari kekerasan atau pemerintahan yang korup di negara asalnya (Babich & Batalova, 2021).

Kehadiran imigran Muslim di Amerika Serikat memiliki pasang surut dalam hal penerimaan oleh masyarakat Amerika Serikat terutama pasca penyerangan gedung World Trade Center (WTC). Nyatanya, jauh sebelum penyerangan aksi terorisme oleh kelompok Al-Qaeda, masyarakat Muslim yang ada di Amerika Serikat belum sepenuhnya diterima oleh masyarakat Amerika Serikat. Peristiwa black September memperparah persepsi dan stigma Masyarakat Amerika Serikat kepada kaum minoritas Muslim. Kebencian terhadap umat uslim di Amerika Serikat meningkat 5 kali lipat pasca kejadian 9/11 (Samari, 2016).

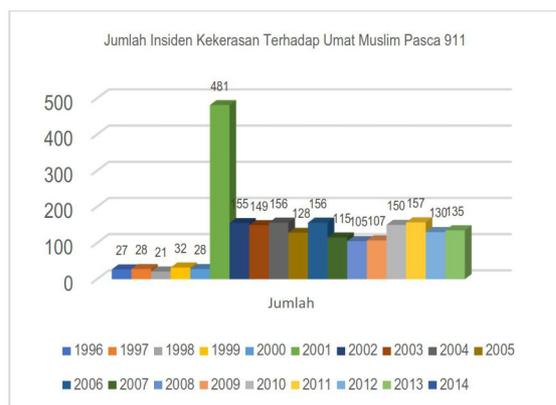
Baik sebelum, maupun peristiwa penyerangan tersebut, mayoritas masyarakat Amerika Serikat memiliki konstruksi pemahaman tersendiri kepada

Masyarakat Muslim, dimulai dari menaruh curiga, merasakan adanya ancaman hingga aksi terror. Banyak masyarakat Muslim mengalami diskriminasi, vandalisme, kekerasan yang diakibatkan oleh tidak diterimanya masyarakat muslim di ruang publik. Stereotip terhadap pemahaman Islam, masyarakat muslim dimata mayoritas masyarakat Amerika memiliki stigma negatif. Bertumbuhnya kecurigaan terhadap masyarakat muslim menciptakan gejala sosial yaitu Islamofobia. Islamofobia atau islam fobia diikuti dengan prasangka buruk terhadap Islam dan masyarakat yang menganut ajaran Islam, yang berakibat kepada terkonstruksinya anti Islam (Istriyani, 2016). Berikut beberapa persepsi masyarakat non Muslim terhadap Islam:

1. Islam digambarkan sebagai budaya yang monolitik
2. Perbedaan nilainya sangat besar yang terkandung dalam ajaran Islam dibandingkan agama lain
3. Barat memersepsikan Islam sebagai agama yang inferior, karena memiliki sifat yang kuno, irasional dan barbarisme
4. Agama Islam mendukung berbagai aksi terorisme, aksi kekerasan terhadap publik serta berasaskan kekerasan di arena politik (Alshammari, 2013).

Berikut data visual yang menggambarkan kenaikan aksi kebencian terhadap masyarakat Muslim yang disebabkan oleh Islamophobia

Table 1. Jumlah Insiden Kekerasan terhadap Umat Muslim Pasca 911



Sumber: Data diolah peneliti

Dari Tabel 1 di atas, dapat dilihat kekerasan yang terjadi di Amerika Serikat pasca penyerangan 911 di tahun 2001 memiliki puncak tertinggi. Hal tersebut disebabkan karena Muslim dianggap memiliki

tanggung jawab penuh terhadap penyerangan yang terjadi. Peningkatan ketakutan dan aksi kekerasan terhadap Muslim tidak berhenti. Islamophobia juga mengakibatkan kematian. Di tahun 2020, tiga orang dibunuh diakibatkan oleh Islamophobia (Belle, 2020).

Keamanan imigran muslim memiliki eskalasi konflik tersendiri karena hadirnya Executive Order atau Perintah Eksekutif adalah sebuah instrumen tertulis dimana Presiden dapat mengeluarkan arahan untuk membentuk kebijakan (Richards, 2021). Kekuatan badan eksekutif dikelola oleh Presiden sebagai kepala negara, kepala pemerintahan dan kepala Panglima Angkatan Bersenjata di Amerika Serikat (WhiteHouse, 2017).

Executive Order tidak secara langsung didukung oleh konstitusi, namun pada artikel 2 di dalam konstitusi Amerika Serikat secara implisit menjelaskan bahwa Presiden sebagai kepala lembaga eksekutif dan kepala angkatan bersenjata wajib menjaga Undang-Undang untuk dijalankan. Perintah Eksekutif pertama diajukan baik dari presiden langsung maupun dari berbagai lembaga eksekutif yang diajukan kepada presiden. Kedua metode tersebut setelah di gagas, memiliki langkah yang sama yaitu diajukan kepada Director of the Office of Management and Budget (OMB) (Richards, 2021). Setelah itu, kebijakan tersebut memasuki tahap dua yaitu dilakukan pengecekan oleh Kejaksaan Agung Amerika Serikat (Attorney Journey) yang akan mengatur bentuk dan legalitasnya. Kejaksaan agung bertanggung jawab kepada Office of Legal Counsel (OLC) bersamaan dengan Department of Justice. Jika Kejaksaan Agung Amerika Serikat telah menyetujui, maka draft kebijakan eksekutif tersebut diberikan kepada Director of the Office of the Federal Register (pemerintah federal) untuk diberikan penomoran serta dilakukan pengecekan bahwa draf tersebut sudah sesuai dan tidak ada kesalahan tipografi. Jika ketiga langkah tersebut sudah dilaksanakan, maka draf kebijakan eksekutif dikembalikan kepada Presiden Amerika Serikat untuk diterbitkan secara resmi dan memiliki kekuatan hukum.

Gagasan Wendt menekankan kepada kepentingan nasional mengacu kepada gagasan atas ide-ide bersama. Dalam hal ini mengacu kepada banyaknya pemangku kepentingan yang sama-sama meyakini bahwa Perintah Eksekutif 13769 merupakan kesepakatan terhadap konstruksi keamanan yang dibutuhkan pada masa pemerintahan Donald Trump. Konstruksi keamanan baru tersebut menjadi dasar bagi Amerika Serikat dalam membuka ruang bagi perspektif baru terkait salah satu elemen dari

keamanan non tradisional yaitu isu terorisme. Namun, memang konstruksi tersebut merujuk kepada 7 negara sehingga terdapat perspektif ancaman nasional dari 7 negara tersebut. Perintah eksekutif 13769 dianggap tidak bisa menjadi dasar bagi Amerika Serikat dalam melakukan penangguhan perjalanan dari 7 negara mayoritas muslim hal itu disebabkan karena kurangnya pembuktian yang mendukung bahwa 7 negara tersebut dapat menimbulkan ancaman terorisme. Terlebih, negara tidak mampu memberikan penjelasan menyeluruh justifikasi penangguhan perjalanan memberikan ancaman terhadap keamanan nasional.

Terdapat 3 gagasan dasar teori konstruktivisme. Pertama, hubungan internasional dalam pemahaman konstruktivisme menjunjung tinggi norma, nilai dan gagasan. Konstruktivisme mempercayai bahwa norma dan kepercayaan memiliki peran penting dalam membentuk perpolitikan internasional. Hal ini tercermin dalam pembentukan dan pengaplikasian perintah eksekutif 13769. Perdebatan publik yang terjadi di Amerika Serikat menunjukkan bagaimana perintah eksekutif 13769 terbentuk dari wacana keamanan nasional yang harus ditingkatkan. Hal tersebut menunjukkan bahwa adanya ke tidak netralan terhadap kebijakan yang dibentuk, karena pembentuk kebijakan telah menaruh stigma dan kepercayaannya sendiri bahwa 7 negara tersebut memberikan ancaman terorisme. Pada dasarnya, jika Amerika Serikat memiliki ketakutan bahwa domestik negaranya terancam isu terorisme, Amerika Serikat bisa meningkatkan keamanan perbatasan dari seluruh negara. Namun pada perintah eksekutif 13769 tersebut, Amerika Serikat hanya menekankan kepada 7 negara yang tidak terbukti bahwa pendatang dari 7 negara tersebut dapat memberikan ancaman.

Kedua, aktor utama yang ditekankan pada teori konstruktivisme adalah negara. Wendt mempercayai bahwa negara memiliki tanggung jawab terhadap pembentukan hubungan internasional karena hubungan tersebut terjalin antar aktor.

Ketiga, struktur hubungan internasional yang dijadikan sebagai pedoman atau arahan bagaimana aktor menghadapi berbagai isu yang terjadi di dunia internasional seperti kerja sama, konflik, peperangan dan lain sebagainya.

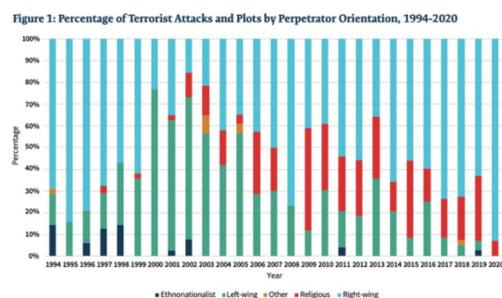
Ke 7 negara tersebut diindikasikan memberikan ancaman terhadap keamanan nasional Amerika Serikat. Indikasi tersebut dijelaskan di dalam dokumen Perintah Eksekutif 13769 (Federalregister, 2017) yaitu Pertama Iran telah ditunjuk sebagai negara sponsor terorisme sejak 1984. Iran menjadi salah satu negara yang memiliki hubungan dan

mendukung kelompok teroris Al'Qaeda. Berbeda dengan Libia, konflik domestik yang dialami Libya sangat kompleks mengingat terdapat berbagai konflik yang melibatkan kelompok teroris, kelompok ekstremis yang ingin menguasai wilayah Libya serta berbagai kelompok teroris yang berasal dari negara lain seperti kelompok teroris Islamic State of Iraq and Syria (ISIS). Ketiga yaitu Somalia yang menjadi negara yang wilayahnya didominasi oleh kelompok terorisme. Kelompok teroris Al Shabaab, Al'Qaeda beroperasi di wilayah Somalia.

Keempat yaitu Sudan yang dianggap mensponsori kelompok terorisme sejak tahun 1993. Hal tersebut disebabkan karena Sudan mendukung kelompok-kelompok teroris internasional seperti Hizbullah, Hamas. Selain itu, aktivitas kelompok terorisme ISIS aktif beroperasi di wilayah Sudan. Lalu Iraq, yang dianggap sebagai salah satu negara yang mendukung kelompok terorisme. Presiden Saddam Husein berkomitmen dalam mendukung aktivitas terorisme dan memberikan izin kepada kelompok terorisme untuk beroperasi di wilayah Iraq (The White House, 2017). Kenam yaitu Syria menjadi negara yang wilayahnya sudah didominasi dan alih kontrol oleh kelompok terorisme ISIS. Tidak dapat dipungkiri bahwa Syria menjadi negara pendukung kelompok terorisme sejak 1979. Syria juga menjadi salah satu negara yang mendukung aktivitas kelompok terorisme. Terakhir adalah Yaman merupakan negara yang sedang berkonflik antara pemerintah dan oposisi Houthi.

Namun faktanya, terdapat ketidaktepatan justifikasi larangan terhadap ketujuh negara tersebut karena Jurnal CSIS yang ditulis oleh Seth G, Jones menyampaikan bahwa terdapat beberapa kelompok terorisme yang melakukan aksi terorisme di wilayah Amerika Serikat yaitu kelompok sayap kanan, kelompok sayap kiri, kelompok agama dan kelompok ethnonationalism.

Tabel 2. Presentase serangan terorisme di Amerika Serikat



Sumber: (Jones et al., 2020)

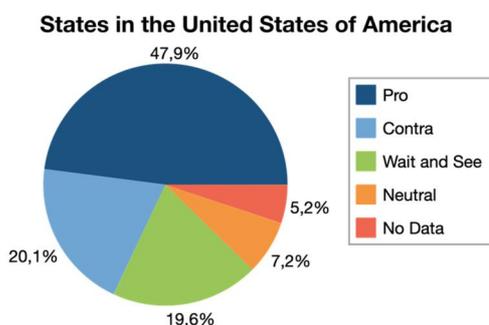
Tabel 2 menunjukkan persentase penyerangan terorisme di Amerika Serikat dimulai dari tahun 1994 hingga 2020. CSIS menjelaskan bahwa dari tahun 1994 hingga pada tahun 2020, penyerangan terorisme terjadi sebanyak 893 serangan. Dari tabel 8 di atas diketahui bahwa mayoritas penyerangan terorisme berasal dari sayap kanan 57 persen, sayap kiri 25 persen, 15 persen dari kelompok agama, 3 persen berasal dari ethnonasionalis dan 0,7 sisanya berasal dari motif lain. Data CSIS juga menunjukkan bahwa walau hanya 15 persen dari total serangan terorisme di Amerika Serikat, namun terdapat fatalitas dari sisi korban yang menunjukkan lebih dari 3000 korban meninggal dunia (Jones et al., 2020).

Justifikasi pelarangan terhadap tujuh negara tersebut pada dasarnya merupakan salah satu janji kampanye Presiden Donald Trump. Presiden Donald Trump menyebutkan bahwa aksi kampanye tersebut merupakan langkah penutupan total terhadap muslim yang akan memasuki wilayah Amerika Serikat.

“Without looking at the various polling data, it is obvious to anybody the hatred is beyond comprehension. Where this hatred comes from and why we will have to determine. Until we are able to determine and understand this problem and the dangerous threat it poses, our country cannot be the victims of horrendous attacks by people that believe only in Jihad, and have no sense of reason or respect for human life. If I win the election for President, we are going to Make America Great Again” (Wang, 2017)

Pengaplikasian perintah eksekutif 13769 memiliki perdebatan diberbagai kalangan seperti aktor pemangku kepentingan diberbagai negara bagian di Amerika Serikat, pebisnis, civitas akademika dan aktor lainnya.

Grafik 2. Presentase Perdebatan Executive Order



Sumber: diolah dari aplikasi MAXQDA

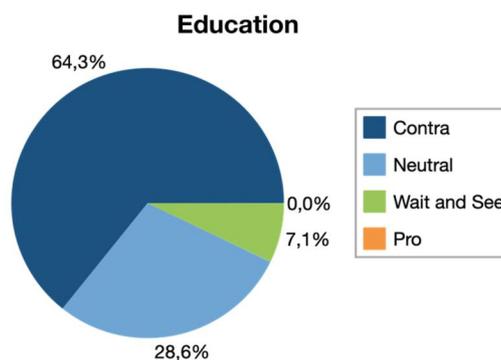
Grafik 2 merupakan persentase jumlah jejak pendapat dari 50 negara bagian Amerika Serikat

pasca diterapkannya kebijakan eksekutif pada masa Presiden Donald Trump. Persentase tersebut menunjukkan dari 50 negara bagian, terdapat 47,9% yang menyetujui perintah eksekutif tersebut diterapkan, 20,1 persen negara bagian melakukan penolakan, 19,6 persen negara bagian yang belum memiliki standing point, 7,2 persen bersikap netral dan 5,2 persen tidak memiliki data.

Beberapa negara bagian menyetujui karena pemerintah dari negara bagian tersebut meyakini bahwa perintah eksekutif yang dibentuk oleh Presiden Donald Trump merupakan salah satu kebijakan guna melindungi penduduk Amerika Serikat dari ancaman nyata yaitu ancaman terorisme yang berasal dari 7 negara. Beberapa negara bagian yang mendukung kebijakan perintah eksekutif tersebut yaitu Alabama, Alaska, Arkansas, Florida, Georgia, Idahi, Indiana, Iowa, Kansas, Kentucky, Louisiana, Missouri, Montana, North Dakota, Oklahoma, South Dakota, Tennessee, Texas, Wisconsin dan negara bagian lainnya.

Beberapa negara melakukan penolakan dengan mempercayai bahwa mereka menyetujui untuk dilakukannya penguatan terhadap perbatasan, namun bukan melalui pendeskreditan terhadap negara-negara yang dianggap sebagai negara dengan aktivitas terorisme tertinggi. Penolakan terhadap kebijakan perintah eksekutif dilakukan di beberapa negara bagian seperti Washington, Vermont, Virginia, Texas, South Carolina, Pennsylvania, Ohio, North Carolina, New York, New Jersey, Nevada, Nebraska, Minnesota, Michigan, Maine, Florida, Arizona dan negara bagian lainnya.

Grafik 3. Respon Dunia Pendidikan

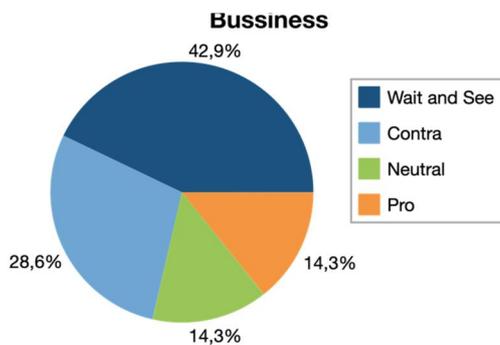


Sumber: diolah dari aplikasi MAXQDA

Grafik 3 menggambarkan respons yang diberikan oleh sektor Pendidikan, baik dari sisi Universitas, Institut, Profesor, dan aktor lainnya. Grafik tersebut menunjukkan 64,3% karena mempercayai bahwa

kebijakan yang dibentuk memberatkan pihak yang terdampak seperti pelajar, guru, peneliti dan berbagai elemen pendidik lainnya. Diskriminasi yang terbentuk memberikan efek kepada perkembangan ilmu pengetahuan karena para pendatang tidak bisa memberikan kontribusi baik penelitian, pengembangan dari sisi pendidikan maupun teknologi. Grafik 3 juga menunjukkan terdapat 7,1% dalam posisi wait and see karena tidak memiliki standing point. Hal tersebut disebabkan karena para entitas dari dunia Pendidikan menjaga identitas pada pendatang dan tidak memberikan konfirmasi kepada pihak berwajib guna perlindungan terhadap pelajar. Grafik 6 juga menunjukkan terdapat 28,6% dalam posisi netral dikarenakan masih menunggu kebijakan yang diajukan oleh beberapa entitas yang melakukan penolakan terhadap kebijakan tersebut.

Grafik 4. Respon Pebisnis



Grafik 4 merupakan persentase respons dari kelompok pebisnis di Amerika Serikat. Grafik 4 menunjukkan terdapat 42,9% yang masih belum memiliki standing point atau masih menunggu keberlangsungan kebijakan. Grafik 8 juga menunjukkan terdapat 28,6% kelompok pebisnis yang menolak kebijakan tersebut disebabkan karena mempercayai kebenaran yang tepat adalah melindungi hak asasi manusia dari ancaman dalam bentuk apa pun termasuk kebijakan yang diterapkan dalam penangguhan 7 negara dengan mayoritas penduduk muslim. Sedangkan, terdapat 14,5 persen yang menyetujui atas kebijakan penangguhan 7 negara disebabkan karena adanya sentimen terhadap identitas muslim sehingga kebijakan penangguhan kedatangan dari 7 negara sudah sepatutnya diterapkan. Dan terakhir, terdapat 14,3% dengan posisi netral dimana kelompok pebisnis tersebut tidak memberikan pernyataan apa pun namun memberikan bantuan kepada korban yang terkena dampak oleh kebijakan yang telah diatur oleh Presiden Donald Trump.

5. Hasil Penelitian

Perintah eksekutif memberikan pengaruh yang kompleks terhadap keamanan manusia karena terdapat hak-hak yang dimiliki individu tersebut berbenturan dengan kebijakan yang telah dibuat. Berikut analisa lebih mendalam terhadap pengaruh perintah eksekutif kepada keamanan manusia.

Tercatat di tahun 2019, jumlah penolakan kedatangan yang berasal dari 13 negara terutama 7 negara dengan mayoritas muslim berjumlah 43.000 (D'Alessio, 2019).

Grafik 5. Jumlah Kedatangan Migran Tahun 2016-2019



Sumber: diolah oleh penulis U.S Department of Homeland Security (2020)

Grafik 5. menunjukkan jumlah kedatangan migran yang tiba ke Amerika Serikat tahun 2016 – 2019. Jumlah kedatangan migran tahun 2015 – 2019 mengalami pengurangan pasca diterapkannya Perintah Eksekutif 13769. Tabel 19 menunjukkan Irak menjadi negara pendatang terbanyak. Pada tahun 2011 – 2015 total kedatangan migran dari Iraq yaitu 91.314 sedangkan pada tahun 2016 – 2019 jumlah kedatangan migran yaitu 3.972.

Berbeda dengan Iran, pada tahun 2011 – 2015 terdapat 65.530 sedangkan total kedatangan di tahun 2016 – 2019 adalah 543.845. Negara yang mengalami penangguhan kedatangan ketiga adalah Libya. Total kedatangan migran di tahun 2011 – 2015 yaitu 2.306 sedangkan di tahun 2016 – 2019 total kedatangan migran yaitu 2.432.

Negara ke 4 yaitu Somalia dengan total kedatangan pada tahun 2011 – 2015 yaitu 25.405 sedangkan total kedatangan di tahun 2016 – 2019 adalah 25.671. Setelah itu, terdapat Sudan dengan total kedatangan pada tahun 2011 – 2016 yaitu 13.066 sedangkan di tahun 2015 – 2019 yaitu 13.281.

Negara kelima adalah Suria total kedatangan pada tahun 2011 – 2015 yaitu 16.545 sedangkan total kedatangan di tahun 2016 – 2019 adalah 31.330 dan terakhir adalah Yaman total kedatangan pada tahun

2011 – 2015 yaitu 16.199 sedangkan total kedatangan di tahun 2016 – 2019 adalah 24.641.

Secara keseluruhan, perbandingan total kedatangan migran pada tahun 2011 – 2015 dibandingkan pada tahun 2016 – 2019 memiliki jumlah yang berbeda, terdapat penurunan namun terdapat juga kenaikan.

Pengaruh Pemerintah Eksekutif tidak hanya memberikan dampak kepada pelaku migrasi Muslim, namun juga memberikan reaksi kepada masyarakat muslim dan sejumlah aktivis Amerika Serikat untuk membantu imigran muslim yang terkena dampak (Yukich, 2018) terutama penyadaran bahwa Islam tidak memiliki ajaran kekerasan pada praktik kehidupan.

Pelaku imigran muslim dan muslim Amerika Serikat sering kali mengalami diskriminasi baik secara verbal maupun nonverbal. Global Business Travel Association (GTVA) mengkonfirmasi bahwa terdapat 186 juta kerugian dari Travel agensi mengingat adanya penangguhan kedatangan yang berlaku di wilayah Amerika Serikat. (Taylor, 2017)

Perintah Eksekutif 13769 memberikan dampak terhadap instabilitas politik dalam negeri karena banyak protes terhadap kebijakan imigrasi yang diciptakan oleh Donald Trump terjadi di berbagai negara bagian Amerika Serikat. Demonstrasi di berbagai bandara utama Amerika Serikat yaitu Los Angeles, San Fransisco, Washington, Dallas, New York's JFK, Raleigh, Houston, dan Seattle (Grinberg & Park, 2017). Tidak hanya di bandara para protestan melakukan protes, namun ditempat utama seperti White House, Battery Park Manhattan, Boston's Copley Square dan protes tersebut juga dilakukan oleh berbagai kalangan. (Gambino et al., 2017).

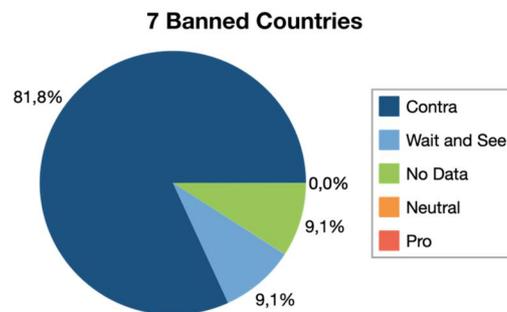
5.1 Respons 7 Negara

Grafik 6 di bawah merupakan gambaran persentase yang menunjukkan bagaimana respons dari 7 negara yang ditangguhkan oleh Presiden Donald Trump. Mayoritas 7 negara memberikan penolakan terhadap kebijakan yang dibentuk oleh Presiden Donald Trump dengan persentase 81,8%. Para aktor tersebut mempercayai bahwa kebijakan tersebut merupakan penghinaan terhadap dunia muslim karena dianggap sebagai pembenaran terhadap kelompok ekstremis dan para pendukungnya.

Kebijakan tersebut dianggap tidak layak, bersifat diskriminasi, melanggar hak asasi manusia. ketidakadilan kebijakan tersebut juga tidak hanya merugikan, namun memunculkan korban aksi teror

lainnya. Justifikasi yang tidak dibenarkan tersebut ditentang keras oleh beberapa negara seperti Iran, Irak, Libiya, dan Yaman.

Grafik 6. Respon 7 Negara



1. Iran

Sikap yang diambil oleh Pemerintah resmi Iran lebih ofensif. Iran melakukan tindakan timbal balik yaitu akan menghentikan pendatang yang berasal dari Amerika Serikat untuk memasuki wilayah Iran yang diakibatkan oleh penangguhan yang dilakukan oleh pemerintahan Donald Trump. Kebijakan Pemerintah Eksekutif Donald Trump dianggap double standard terhadap penanganan terorisme.

2. Yaman

Menteri Luar Negeri Yaman menolak bahwa negaranya diklasifikasikan sebagai negara atau penduduknya sebagai sumber terorisme. Kebijakan yang diambil oleh Amerika Serikat dianggap tidak legal, tidak sah dan tidak dapat dibenarkan.

3. Libya

Ketidakstabilan situasi politik domestik Libya menjadi salah satu alasan diberlakukannya penangguhan kedatangan ke Amerika Serikat. badan resmi Amerika Serikat menyatakan telah terjadi ledakan di markas ISIS yang berada di wilayah Libya (Dewan & Smith, 2017).

Kementerian Luar Negeri Libya menyatakan bahwa kebijakan yang diambil oleh Amerika Serikat merupakan bentuk rasisme dan ketidakadilan. Perintah Eksekutif order tersebut melanggar kesetaraan, menciptakan diskriminasi di dunia internasional. Kebijakan tersebut juga menyebabkan konferensi tingkat tinggi Libya yang diatur pada pertengahan Januari di Washington dibatalkan (Abdelaziz, 2017).

4. Suria

Pada tahun 2016, Suria menjadi salah satu negara yang mendatangkan pengungsi ke Amerika Serikat yaitu dengan total 38.901 pengungsi muslim yang hadir di Amerika Serikat (Connor, 2016). Presiden

Bashar Al-Assad mendeklarasikan bahwa Pemerintah Eksekutif tidak menargetkan penduduk Suria, namun menargetkan kelompok teroris yang berkembang di Suria.

5. Irak

Irak menjadi rumah bagi tentara Amerika Serikat yang berjumlah lebih dari 6.000 tentara yang bergerak di garis terdepan dalam memerangi kelompok ISIS (Chappell, 2017). Pemerintahan Irak mempercayai bahwa akan dilakukannya pembuatan ulang terhadap perintah eksekutif 13769 yang memasukkan Irak ke dalam negara yang termasuk ke dalam penangguhan. Mengingat, jika Pemerintah Eksekutif terus berlanjut, maka kebijakan luar negeri Amerika Serikat akan memberikan jarak antara Amerika atau Iran dan Rusia (Barria, 2017)

6. Sudan

Sudan tidak terpengaruh oleh Pemerintah Eksekutif yang dikeluarkan oleh Presiden Amerika Serikat, namun Sudan lebih mengutamakan pengembangan kerja sama di berbagai bidang seperti ekonomi dan keamanan dengan Amerika Serikat (Abdelaziz, 2017).

7. Somalia

Ketidakstabilan politik yang hadir di Somalia menjadikan Amerika Serikat sebagai negara favorit bagi pengungsi. Namun tidak dapat dipungkiri bahwa pengungsi menjadi subjek dalam pengecekan dengan keamanan tertinggi di Amerika Serikat.

6. Kesimpulan

Perintah Eksekutif 13769 lebih banyak memberikan dampak terhadap imigran Muslim yang berada di Amerika Serikat. Pandangan konstruktivisme mengafirmasi bahwa ancaman keamanan merupakan kondisi yang dapat dibentuk oleh entitas yang memiliki power berdasarkan gagasan dan kepercayaan bersama. Sehingga Pemerintah Eksekutif 13769 menjadi kebijakan yang mengafirmasi bahwa ancaman baru dapat dibentuk oleh identitas dan entitas. Beberapa dampak yang dari ancaman baru tersebut adalah adanya peningkatan Islamophobia. Selain itu, dampak ekonomi juga dirasakan mengingat banyaknya perusahaan yang sulit mendapatkan pekerja imigran yang murah. Di sisi lain, kondisi ini juga berimbas pada meningkatnya anggaran operasional dan perlindungan di wilayah perbatasan, menurunnya minat wisatawan, khususnya dari 7 negara dan sejumlah negara Islam lainnya ke Amerika Serikat. Selain itu, kebijakan ini juga memicu peningkatan

diskriminasi yang dialami oleh penduduk Muslim dan imigran Muslim yang berada di Amerika Serikat, baik secara verbal maupun non verbal.

Sebagaimana dikonfirmasi oleh mazhab konstruktivisme dalam studi hubungan internasional, bahwa faktor identitas yang dibentuk oleh persepsi, keyakinan, dan cara pandang yang berkembang di sekitar para aktor perumus kebijakan, bisa berpengaruh signifikan terhadap produk kebijakan politik luar negeri suatu negara. Alhasil, sebagai evaluasi, Pemerintah Eksekutif 13769 terbukti memberikan dampak yang relatif negatif terhadap kondisi politik dan sosial-ekonomi Amerika Serikat. Sebab, kebijakan tersebut tidak berdasarkan pada realitas dan pembacaan data dan pemahaman atas kondisi keamanan, sosial-politik dan sosial-ekonomi yang memadai. Kebijakan tersebut lebih banyak didorong oleh logika, keyakinan dan cara pandang berbasis sentimen identitas yang dipromosikan oleh kekuatan politik sayap kanan Amerika Serikat. Terbukti, 7 negara yang dilarang masuk ke Amerika Serikat tidak terbukti menjadi negara yang dapat memberikan ancaman secara memadai terhadap aspek pertahanan dan keamanan Amerika Serikat itu sendiri.

Daftar Pustaka

1. Abdelaziz, M. (2017). Regional Consequences of Trump's Travel Ban. Washingtoninstitute.Org. <https://www.washingtoninstitute.org/policy-analysis/regional-consequences-trumps-travel-ban>
2. Alshammari, D. (2013). Dalal Alshammari. 3(15), 177–180.
3. Babich, E., & Batalova, J. (2021). Central American Immigrants in the United States. Migrationpolicy.Org.
4. Barria, C. (2017). Trump Entry Ban: Iraqis React To Removal From List of Barred Travelers. Nbcnews.Com.
5. Belle, E. (2020). Yes, 9/11 Did Cause An Increase In Islamophobia. Refinery29.Com.
6. Chappell, B. (2017). 7 Targeted Countries React To Trump's Ban On Immigration. Npr.Org.
7. Connor, P. (2016). U.S. admits record number of Muslim refugees in 2016. Pewresearch.Org. <https://www.pewresearch.org/fact-tank/2016/10/05/u-s-admits-record-number-of-muslim-refugees-in-2016/>
8. D'Alessio, L. (2019). Muslim Ban No More: In Biden's U.S. Everyone's Welcome. Anin-jesticmag.Com.
9. Denzin, N. K., & Lincoln, Y. S. (2018). The SAGE Handbook of Qualitative Research. In Synthese (Firts

- Edit, Vol. 195, Issue 5). SAGE Publications, Inc. <https://doi.org/10.1007/s11229-017-1319-x>
10. Dewan, A., & Smith, E. (2017). What it's like in the 6 countries on Trump's travel ban list. CNN. <https://edition.cnn.com/2017/01/29/politics/trump-travel-ban-countries/index.html>
 11. Dr. Farida Nugrahani, M. H. (2014). Metode Penelitian dalam Penelitian Pendidikan Bahasa (Vol. 1, Issue 1). <http://e-journal.usd.ac.id/index.php/LLT%0A>
<http://jurnal.untan.ac.id/index.php/jpdpb/article/view/File/11345/10753%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.sbspro.2015.04.758%0Awww.iosrjournals.org>
 12. Federalregister. (2017). Protecting the Nation From Foreign Terrorist Entry Into the United States. Federal Register, 82(45), 8977–8982.
 13. Gambino, L., Siddiqui, S., Owen, P., & Helmore, E. (2017). Thousands protest against Trump travel ban in cities and airports nationwide. The Guardian.Com. <https://www.theguardian.com/us-news/2017/jan/29/protest-trump-travel-ban-muslims-airports>
 14. Grinberg, E., & Park, M. (2017). 2nd day of protests over Trump's immigration policies. Cnn.Com.
 15. Hirschman, C., Kasinitz, P., DeWind, J., & Portes, A. (1999). Handbook of International Migration. Russell Sage Foundation. [https://books.google.co.id/books?hl=en&lr=&id=nPsWAwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PR7&dq=migration+international+relations&ots=jfYtKsaxFV&sig=WV9qIidmFv_MDx0Himpy9l2H44&redir_esc=y#v=onepage&q=migration international relations&f=false](https://books.google.co.id/books?hl=en&lr=&id=nPsWAwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PR7&dq=migration+international+relations&ots=jfYtKsaxFV&sig=WV9qIidmFv_MDx0Himpy9l2H44&redir_esc=y#v=onepage&q=migration%20international%20relations&f=false)
 16. House, T. W. (2017, March 06). The White House. Dipetik November 2020, dari whitehouse.gov: <https://www.whitehouse.gov/presidential-actions/executive-order-protecting-nation-foreign-terrorist-entry-united-states-2/>
 17. Huntington, S. P. (1997). The erosion of American national interests. Foreign Affairs, 76(5), 28–48. <https://doi.org/10.2307/20048198>
 18. Hurd, I. (2008). Constructivism. In The Oxford Handbook of International Relations (pp. 298–316). Oxford University Press.
 19. Istriyani, R. (2016). Media: Causes and Strategies To Overcome Islamophobia (Psychological and Sociological Study). QIJIS (Qudus International Journal of Islamic Studies), 4(2), 201. <https://doi.org/10.21043/qijis.v4i2.1759>
 20. Jackson, R., & Sorensen, G. (1999). Introduction to International Relations (3rd ed.) (Vol. III). New York, United States of America, United States of America: Oxford University Press Inc.
 21. Jones, S. G., Doxsee, C., & Harrington, N. (2020). The Escalating Terrorism Problem in the United States. CSIS, June, 1–10. <https://www.orfonline.org/expert-speak/countering-violent-extremism-in-the-us-a-work-in-progress/>
 22. Richards, K. T. (2021). Executive Orders: An Introduction. Congressional Research Service: Report, 1–22. <http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=tsh&AN=150111193&site=ehost-live>
 23. Samari, G. (2016). Islamophobia and public health in the United States. American Journal of Public Health, 106(11), 1920–1925. <https://doi.org/10.2105/AJPH.2016.303374>
 24. Selvin, E. (2016). Theories of International Migration: Critical Reflections. April, 1–15. <https://doi.org/10.13140/RG.2.1.1767.8486>
 25. Ser, K. K. K. (2016). Data: Hate crimes against Muslims increased after 9/11. Pri.Org. <https://www.pri.org/stories/2016-09-12/data-hate-crimes-against-muslims-increased-after-911>
 26. Steans, J., & Llyord, P. (2009). Hubungan Internasional, Perspektif dan Tema. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
 27. United States: <https://immigrationtounitedstates.org/351-arab-immigrants.html>
 28. Sussex, M., Clarke, M., & Medcalf, R. (2017). National security: between theory and practice. Australian Journal of International Affairs, 71(5), 474–478. <https://doi.org/10.1080/10357718.2017.1347139>
 29. Taylor, R. (2017). Tourism Industry Feels Financial Fallout from Trump's Ban. Voanews.Com. <https://www.voanews.com/a/tourism-industry-feels-financial-fallout-from-trump-s-ban/3725515.html>
 30. The White House. (2017). Saddam Hussein's Support for International Terrorism. The White House. <https://georgewbush-whitehouse.archives.gov/infocus/iraq/decade/sect5.html>
 31. Theys, S. (2018, February 24). Introducing Constructivism in International Relations Theory. International Relations Theory, 1(Constructivism Theory), 1–4.
 32. U.S Department of Homeland Security. (2020). 2019 Yearbook of Immigration Statistics. Library of Congress.
 33. Wang, C. (2017). Trump website takes down Muslim ban statement after reporter grills Spicer in briefing. CNBC.
 34. Weiner, M. (1985). On international migration and international relations. Population & Development Review, 11(3), 441–455. <https://doi.org/10.2307/1973247>
 35. WhiteHouse. (2017). The Executive Branch. Whitehouse.Org.
 36. Yukich, G. (2018). Muslim American Activism in the Age of Trump. April, 1–28. <https://doi.org/10.1093/soarel/sry004> Neorealism explains that security is the goal of all states. In the field of international relations, a nation's security can be attained through the effective utilization of its defense capabilities. In an anarchic international system, big countries will continue to increase their power to ensure their country's security. This assumption means that being a strong country is a way to avoid threats that will undermine national

security (Waltz, 1988). Countries will continue to compete to improve their defense systems to maintain their country's security. In supporting state security, the military is an essential indicator of the defense system that every country must have. Strengthening a country's military is emphasized by increasing the country's primary weapons system (alutsista) instrum